

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) DI SDN TLOGOSARI WETAN 01 KECAMATAN
PEDURUNGAN KOTA SEMARANG**

Oleh :

**Galih Wardana, Drs R Slamet Santoso, M.Si, Dra Dewi Rostyaningsih M.Si
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

**Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum. Tembalang, Semarang Kotak
Pos 1269**

Telepon (024)745407 Faksimili (024) 7465405

Laman: [http :// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Education is a planned effort in the development of self in order to realize the potential of a civilized society, morality, personality, intelligent and have a prosperous life skills (spiritual-knowledged based society). Which is currently able to improve the quality of education in Indonesia is through fund School Operational Assistance (BOS) allocated to schools at primary and secondary School Operational Assistance Program is a central government assistance to all students SD / MI and SMP / MTs underprivileged throughout Indonesia both public and private on reduction of fuel subsidy because it was feared that the increase in fuel prices and the global financial crisis caused a decline in purchasing power and will negatively impact the poor to get an education.

The purpose of the research to find out and get a clear picture about the implementation of the BOS program on SDN Tlogosari Wetan 01 Sub Pedurungan, and used materials and used as an ingredient on the study of the implementation of the BOS program on SDN Tlogosari Wetan 01 Sub Pedurungan, Semarang.

In this research used theory implementation of G Edward III which states "*the successful implementation of depengaruhi by four variables: attitude, HR, Communications, Bureaucratic Structure*"

The method used in this research is descriptive qualitative research, where the research is more emphasis on the analysis and at the same time portraying the reality of the existing conditions, so the results of these studies are generating a lot of descriptive data in the form of words or in writing of the perpetrators were observed.

Based on research conducted by the authors of the policy implementation of BOS in SDN Tlogosari Wetan 01 Semarang is fully effective, kaBerdasarkan research conducted by the authors of the policy implementation of BOS in SDN Tlogosari Wetan 01 Semarang is fully effective, because the indicators that lead to the achievement of BOS policy objectives set by the government much has been achieved, only the need for dissemination to relevant parties in relation to the BOS, and enhance the performance of human resources-related.

Keywords: Policy Implementation, BOS, Tlogosari SDN Wetan 01

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam pengembangan potensi diri dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berakhlak mulia, berkepribadian, cerdas dan memiliki keterampilan hidup sejahtera (*spiritual-knowledged based society*). Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis (Miraje, 2007: 1). Sekolah sebagai lembaga pelayanan dibidang pendidikan diharapkan dapat menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, karena itulah kualitas pembelajaran di sekolah harus selalu ditingkatkan guna memberi jawaban kongkrit dari kebutuhan masyarakat modern tersebut. Disamping itu bahwa pendidikan yang dipandang masyarakat merupakan investasi jangka panjang, maka diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang

mampu menghadapi kehidupan global, kompetitif, dan inovatif. Upaya pemerintah dalam peningkatan mutu diwujudkan dalam peningkatan sarana belajar, inovasi kurikulum hingga peningkatan mutu guru.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan juga telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Selain itu beberapa kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan pada sekolah pada tingkat dasar dan menengah pertama. Program ini diharapkan dapat mempercepat penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dalam bentuk pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat. Program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk

membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang ?
2. Apakah implementasi kebijakan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah :

1. Untuk menjelaskan dan mendapatkan gambaran secara jelas tentang implementasi program BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
2. Untuk dijadikan bahan rekomendasi dan dipergunakan sebagai bahan kajian tentang pelaksanaan program BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
3. Untuk menjelaskan gambaran mengenai apakah implementasi kebijakan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang ingin meneliti pada masalah yang sama atau ingin melakukan penelitian lanjutan.
2. Untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu, terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun.

Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif, yaitu sebuah bentuk penelitian yang menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2004) didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir dan pandangan subjek penelitian sehingga dapat menjelaskan mengenai implementasi kebijakan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai dalam riset haruslah benar,

karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis menempatkan diri sebagai pengamat, untuk melihat berbagai fenomena yang muncul berkaitan dengan implementasi program tersebut.
- b. Wawancara, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan untuk mendapat informasi secara lebih jelas, detail dan mendalam. Teknik ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Model pertanyaan yang digunakan adalah dengan pertanyaan terbuka.
- c. Dokumen-dokumen, yaitu setiap bahan yang tertulis. Pada dasarnya dokumen sebagai sumber data yang dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan atau bahkan meramalkan. Dokumen yang dimanfaatkan dapat berasal dari mana saja sepanjang berhubungan dengan fokus penelitian yang berupa arsip dan laporan pada pemerintahan terkait.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain (Sugiyono, 2005: 103) dilakukan untuk memperoleh gambaran umum

dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut dengan analisis taksonomi. Secara singkat tata cara analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan di lapangan. Cara mereduksinya dengan meringkas, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus dan membuat memo.
- b. Penyajian data, dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, yang mungkin alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, tukar pikiran diantara teman sejawat

atau meminta respon/komentar kepada responden yang telah dijangkau datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohnya, dan kecocokannya.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01

a. Tahap alokasi dana

Secara umum bahwa pihak SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan telah mengikuti prosedur yang ada dalam penentuan alokasi dana BOS dan mendukung terkait dengan diterapkannya kebijakan BOS. Dengan demikian, tataran implementasi BOS berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari Jumlah siswa yang diajukan sudah sesuai dengan kenyataan, dan sudah di setujui pihak komite sekolah.

b. Alur penyaluran dan pengambilan data

Sesuai petunjuk pelaksanaan Program BOS penyaluran dana BOS dilakukan lewat Bank pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan memiliki nomor rekening sekolah (rutin) atas nama BOS sekolah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang/Unit : Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Penyaluran tersebut

dilakukan secara bertahap yakni setiap tiga bulan sekali yang akan langsung di transfer dari APBD ke rekening sekolah yang telah dibuat tersebut dan mengenai pengambilan dana diserahkan pada pihak sekolah, sesuai dengan tataran implementasi BOS berjalan dengan baik. Meskipun adanya (biasanya mengalami) keterlambatan untuk triwulan pertama yang dikarenakan oleh perubahan prosedur transfer dana dari rekening anggaran pembelanjaan negara (APBN) ke rekening anggaran Pembelanjaan daerah (APBD).

c. Penggunaan dana bos

Pelaksanaan penggunaan dana BOS sebagian besar bertumpuk pada anggaran berupa RAPBS yang ada pihak sekolah sudah mematuhi aturan yang pelaksanaan dalam tataran implementasi BOS belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari aturan pelaksanaan penggunaan dana BOS sebagian besar bertumpuk pada anggaran untuk dialokasikan dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu 20% belanja pegawai, 75% belanja barang dan jasa, dan 5% belanja modal seperti kegiatan siswa seperti ulangan harian, ulangan umum serta kegiatan-kegiatan kesiswaan yang lain. Selain itu, adanya

ketidakefektifan program terlihat dari ketidak sinkronan antara tujuan dari program BOS dengan realisasi dilapangan ini terlihat setelah adanya program BOS ini sehingga SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan tidak semuanya (belum) membebaskan para siswa dari semua biaya pendidikan. Dikarenakan adanya Dana BOS bagi Sekolah-sekolah negeri, dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam bentuk program / kegiatan, sedangkan untuk belanja pegawai di SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan rata-rata tiap tahun lebih dari 20 %, maka pihak sekolah masih belum bisa menggratiskan semua biaya operasional sekolah bagi siswa.

- d. Tahap monitoring
- Tahap monitoring program BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan dilakukan oleh dua pihak yaitu oleh Tim Manajemen BOS Kota Semarang yang terdiri dari Bawasda, Dinas Pendidikan Kabupaten serta Pengawas SD dan SMP yang ditunjuk dari masing-masing Kecamatan dan pihak kedua yaitu Komite sekolah, dalam tataran implementasinya belum berjalan efektif atau kurang baik. Dengan tataran implementasi belum berjalan efektif atau kurang baik bahwa proses monitoring

yang dilakukan oleh tim manajemen BOS Kabupaten Kota Semarang memang dirasa kurang efektif dan kurang. Sebab, kuesioner hanya akan mengungkap hal-hal yang bersifat administratif, sedangkan yang ada di lapangan sulit untuk diketahui. Namun, dengan adanya kuesioner tersebut merupakan cara formal yang paling mudah dilakukan mengingat lokasi sekolah yang berjauhan. Selain itu waktu yang dibutuhkan pun relatif lebih singkat dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan Monitoring yang dilakukan Komite sekolah dalam setiap kegiatan pemanfaatan BOS sudah baik, koordinatif dan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Komite sekolah selalu memantau pelaksanaan setiap kegiatan sekolah yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS melalui SPJ yang di buat. Hal ini tentunya telah sesuai dengan peran komite yang merupakan organisasi rekanan dari pihak sekolah sekaligus wakil dari wali murid yang mengawasi hal-hal yang bersifat teknis tentang monitoring. penyaluran dana BOS agar selalu sesuai dengan keputusan awal yang telah disepakati dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada.

e. Tahap pelaporan

Tahapan pelaporan ini SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan sudah melaksanakan mekanisme yang ada pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS diusahakan sesuai dengan juklak-juknis yang ada dan waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian dalam tataran implementasi kebijakan BOS sudah berjalan dengan baik, meskipun masih juga adanya keterlambatan pelaporan disebabkan karena terdapat perubahan peraturan dalam penggunaan BOS, sehingga pihak sekolah harus memperbaiki terlebih dahulu laporan yang ada. Sedangkan dalam hal pertanggung jawaban dan transparansi pihak sekolah sebagai pengelola dana BOS harus mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini sekolah juga berusaha sebaik mungkin mengelola dana BOS untuk kemajuan siswa sesuai dengan ketentuan yang ada secara transparan. Adapun mekanisme pertanggungjawaban dana BOS tersebut harus secara transparan dan bertanggungjawab, serta memberitahukan laporan pertanggungjawaban pada orang tua murid saat rapat akhir tahun dan memasang pengumuman di papan

pengumuman sekolah (Format BOS 11).

f. Manfaat yang diperoleh

Program BOS dapat mengurangi keterbatasan anggaran sekolah, pihak sekolah sudah bisa memenuhi biaya operasionalnya. Program BOS secara umum memberikan hasil yang positif bagi sekolah karena memberikan pengelola sekolah, guru, dan murid kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran secara lebih baik dan mengurangi beban finansial proses pendidikan. Dengan uraian di atas maka dalam tataran implementasi kebijakan BOS kurang berjalan baik. Hal ini terlihat bahwa implementasi kebijakan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01, kurang didukung dengan sumberdaya yang memadai, dan kurang didukung dengan partisipasi masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan dana BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 belum didukung dengan prasyarat utama agar pelaksanaan kebijakan BOS berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai implementasi kebijakan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 Semarang sudah sepenuhnya efektif, karena indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan kebijakan BOS yang ditetapkan pemerintah banyak yang

sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor/elemen seperti yang dikemukakan Edward III, secara umum proses implementasi subsidi BOS mekanismenya mengalami baik, disamping adanya keterlambatan dari tahap pelaporan dan tahap monitoring. Hal ini disebabkan oleh karena lambatnya proses verifikasi dan demi efisiensi, mengingat jumlah tenaga pengawas yang belum memadai.

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program BOS di SDN Tlogosari Wetan 01

a. sikap pelaksana

Faktor pendukung implementasi kebijakan BOS mengenai Sikap pihak pelaksana tingkat sekolah yakni SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan dapat dikatakan sudah berperan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan, mulai dari tahapan sosialisasi sampai dengan tahapan pelaporan. SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan sudah melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan BOS sesuai dengan juklak. Dan sampai saat ini belum ditemukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya mendasar. Paling-paling Cuma kesalahan

dalam format laporan, itu pun sudah direvisi.

b. SDM

Faktor pendukung implementasi kebijakan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 adalah adanya transparansi yang dibangun dengan baik, adanya dukungan dari guru, orang tua murid, dan Komite Sekolah. Sedangkan yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan kebijakan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 adalah kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan BOS, kurangnya kesiapan sumberdaya yang dimiliki, belum adanya kewenangan penuh terhadap pengelolaan sumberdaya, sarana-prasarana yang kurang memadai.

c. Komunikasi

Faktor pendukung implementasi kebijakan BOS mengenai pelaksanaan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan, komunikasi harus terjalin dengan baik yakni antara Tim Manajemen BOS kota Semarang, pihak sekolah serta Komite Sekolah. Namun dalam kenyataannya komunikasi tersebut belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Komunikasi antara pihak sekolah dengan TIM Manajemen BOS kabupaten/kota misalnya, komunikasi yang terjalin terlihat sangat kurang, hal ini terlihat dari jarangya proses monitoring yang dilakukan. Proses monitoring hanya

dilakukan melalui kuesioner saja.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01
 - a. Tahap alokasi dana

Secara umum bahwa pihak SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan telah mengikuti prosedur yang ada dalam penentuan alokasi dana BOS dan mendukung terkait dengan diterapkannya kebijakan BOS.
 - b. Alur penyaluran dan pengambilan data

Berkaitan dengan hal ini, SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan memiliki nomor rekening sekolah (rutin) atas nama BOS sekolah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang/Unit : Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Penyaluran tersebut dilakukan secara bertahap yakni setiap tiga bulan sekali yang akan langsung di transfer dari APBD ke rekening sekolah yang telah dibuat tersebut dan mengenai pengambilan dana diserahkan pada pihak sekolah, sesuai dengan tataran implementasi BOS berjalan dengan baik.
 - c. Penggunaan dana bos

Pelaksanaan penggunaan dana BOS sebagian besar bertumpuk

pada anggaran berupa RAPBS yang ada pihak sekolah sudah mematuhi aturan yang pelaksanaan dalam tataran implementasi BOS belum berjalan dengan baik.

- d. Tahap monitoring

Tahap monitoring program BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan dilakukan oleh dua pihak yaitu oleh Tim Manajemen BOS Kota Semarang yang terdiri dari Bawasda, Dinas Pendidikan Kabupaten serta Pengawas SD dan SMP yang ditunjuk dari masing-masing Kecamatan dan pihak kedua yaitu Komite sekolah, dalam tataran implementasinya belum berjalan efektif atau kurang baik.
- e. Tahap pelaporan

Tahapan pelaporan ini SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan sudah melaksanakan mekanisme yang ada pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS diusahakan sesuai dengan juklak-juknis yang ada dan waktu yang telah ditentukan.
- f. Manfaat yang diperoleh

Program BOS dapat mengurangi keterbatasan anggaran sekolah, pihak sekolah sudah bisa memenuhi biaya operasionalnya. Program BOS secara umum memberikan hasil yang positif bagi sekolah karena memberikan pengelola

sekolah, guru, dan murid kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran secara lebih baik dan mengurangi beban finansial proses pendidikan. Dengan uraian di atas maka dalam tataran implementasi kebijakan BOS kurang berjalan baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai implementasi kebijakan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 Semarang sudah sepenuhnya efektif, karena indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan kebijakan BOS yang ditetapkan pemerintah banyak yang sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor/elemen seperti yang dikemukakan Edward III, secara umum proses implementasi subsidi BOS mekanismenya mengalami baik, disamping adanya keterlambatan dari tahap pelaporan dan tahap monitoring. Hal ini disebabkan oleh karena lambatnya proses verifikasi dan demi efisiensi, mengingat jumlah tenaga pengawas yang belum memadai.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program BOS di SDN Tlogosari Wetan 01
 - a. sikap pelaksana
Faktor pendukung implementasi kebijakan BOS mengenai Sikap pihak pelaksana tingkat sekolah

yakni SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan dapat dikatakan sudah berperan dengan baik.

- b. SDM
Faktor pendukung implementasi kebijakan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 adalah adanya transparansi yang dibangun dengan baik, adanya dukungan dari guru, orang tua murid, dan Komite Sekolah. Sedangkan yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan kebijakan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 adalah kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan BOS, kurangnya kesiapan sumberdaya yang dimiliki, belum adanya kewenangan penuh terhadap pengelolaan sumberdaya, sarana-prasarana yang kurang memadai.
- c. Komunikasi
Faktor pendukung implementasi kebijakan BOS mengenai pelaksanaan BOS di SDN Tlogosari Wetan 01 Kecamatan Pedurungan, komunikasi harus terjalin dengan baik yakni antara Tim Manajemen BOS kota Semarang, pihak sekolah serta Komite Sekolah.

Saran-saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian pada satuan pendidikan dasar tersebut dapat peneliti sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan program BOS

- a. Mengenai keterlambatan dikarenakan prosedur, maka BOS sebaiknya tepat waktu, pengadaan buku acuan agar ditambah, jumlah BOS agar diperbesar, dana BOS diberikan kepada yang tepat,
- b. Mengenai ketidaefektifan program karena ketidak sinkronan program penggunaan dana BOS, maka dalam pembuatan dan penyusunan RAPBS hendaknya melibatkan semua unsur pendidikan termasuk komite sekolah sehingga semua program sekolah mendapat dukungan dari masyarakat.
- c. Mengenai tahap monitoring, oleh Tim manajemen BOS dirasa kurang efektif, maka sebaiknya adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan kebijakan dalam pengelolaan dana BOS, sekolah berkonsultasi dengan tim manajemen BOS Kota maupun musyawarah dengan pihak internal sekolah, komite sekolah dan orang tua murid. Sedangkan keterlambatan penyaluran dana BOS, sekolah memiliki kebijaksanaan dengan menggunakan dana talangan dari sumber dana lain yang belum segera dimanfaatkan. Sumber dana lain tersebut yaitu dana dari Pemerintah Pusat, dana dari Pemerintah Daerah, dana SSN, maupun sumbangan sukarela dari orang tua murid dan masyarakat.
- d. Dalam hal pelaporan penggunaan dana BOS, maka
 - e. sebaiknya dalam mekanisme pelaporan BOS perlu diperjelas, ketentuan BOS sebaiknya fleksibel artinya menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, Diperlukan adanya penargetan dan pengaturan alokasi dana, khususnya untuk bantuan siswa miskin dan setiap jenis pos pengeluaran, sehingga penggunaan dana BOS lebih diprioritaskan untuk pemberian manfaat bagi siswa miskin. Di samping itu perlu adanya aturan umum proses penentuan siswa miskin, serta dalam menerima BOS perlu adanya perbedaan antara sekolah mampu dan tidak mampu.
 - e. Perlu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah dan seluruh pengelola sekolah agar tercipta peningkatan mutu pendidikan.
 - f. Demi terwujudnya pemanfaatan dana BOS yang efektif maka diharapkan dapat mengatur pola pembiayaan operasional pemanfaatan dana BOS yang lebih efisien disertai dengan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan menambah jumlah pegawai/staff khususnya yang menangani dana BOS perlu lebih ditingkatkan.
2. Saran guna perbaikan faktor pendukung dan penghambat implementasi BOS
 - a. Perlu sosialisasi kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan adanya BOS, dimana sosialisasi kepada para aktor

implementasi (Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah) agar lebih ditingkatkan serta diberikan petunjuk

pelaksanaan/petunjuk teknis yang lebih operasional dan praktis dan efektif agar para aktor implementasi mendapatkan kejelasan dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya. Dalam hal ini, maka kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru-guru hendaknya berkoordinasi dengan baik, agar pelaksanaan dana BOS dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, hendaknya ada pembinaan tentang BOS secara langsung dan terus menerus, untuk menghindari salah tafsir dan penyimpangan

- b. Pemerintah diharapkan mensosialisasikan kebijakan BOS secara benar dan transparan kepada masyarakat, melalui berbagai media dan kesempatan secara terus menerus, sehingga terhindar dari *misunderstanding* dan *miscommunication*.
- c. Pemerintah ketika membuat kebijakan, hendaknya mempersiapkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga SDM tersebut dapat bekerja secara baik dan profesional. Hal ini dilakukan agar hubungan pihak sekolah dengan masyarakat hendaknya perlu diperluas dan ditingkatkan, artinya hubungan tidak hanya dengan orang tua murid akan tetapi harus diperluas dengan

masyarakat di luar sekolah seperti pihak swasta atau dunia usaha/dunia industri. Hal ini belum terlaksana, maka pemerintah terutama Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Semarang memberikan pelatihan kepada para Kepala SD dan Komite Sekolah.

- d. Diharapkan dalam menjalankan perannya, sekolah baik kepala guru dan pengelola sekolah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan dana BOS. Dengan kata lain, Sekolah agar diberikan kewenangan penuh untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dan dibutuhkan. Dengan demikian sekolah memiliki keleluasaan dalam membuat perencanaan terhadap pengelolaan sumberdaya berdasarkan kebutuhan lokal, terutama pengelolaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar & Teguh Juwono. 2003. *Kebijakan Publik: Konsep Dan Strategi*. Semarang: JP Universitas Diponegoro.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. 1998. *Introduction to Qualitative Research Methode*. New York : John Willey dan Sons Inc.

- Depdiknas, 2008. *Pengkajian Efektifitas BOS Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC. Congressional Quarterly, Inc.
- Gibson et al. 1996. *Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, Proses*. Penerjemah : Djoerban Wahid. Jakarta : Erlangga
- Irfan Islamy, M. Dr. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moekijat, RS. 1995. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : Mandar Maju Publishing,
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Gratis dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu. Depdiknas, 2009
- Sedah Ayu Fitriani. Skripsi: Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Desa Ekonomi Simpan Pinjam Di Kabupaten Pati. Surakarta: (tidak diterbitkan) Fisip UNS 2002.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yasyin, Sulchan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah.
- Yusuf Farida. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Program untuk Program Pendidikan*. Jakarta Rineka Cipta,
- Sumber Lain**
- Buku Pedoman Umum Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2010-2011.
- Pembukaan UUD 1945.
- PP No. 48 Tahun 2008.
- UU No. 20 Tahun 2003.
- UU No. 22 Tahun 2003, pasal 34 ayat 2 dan 3.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepmen/036/U/1995 tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah.
- <http://dikdas-babel.blog2.plasa.com/>
- <http://www.slideshare.net/sekolahmay a/pedoman-bos-2009-versi-lengkap akses jam 14.00, 26 Desember 2012>
- <Http://RakyatDemokrasi.net/> Tentang BOS/. Diakses 20 Desember 2012